



ARTA KEDATON MAKMUR PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Jl. Laks. Malahayati No. 139 Telp. (0721) 473855 (Hunting) Fax. (0721) 473882
Telukbetung - Bandar Lampung

No: 022/AKM/III/2025

Bandar Lampung, 5 Maret 2025

Kepada Yth,
Ketua Umum Perbarindo dan Majalah Media BPR
Rumah Perbarindo Komplek Patra II No. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani - Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Perihal: Laporan Transparasi Tata Kelola PT. BPR Arta Kedaton Makmur Tahun
Buku 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS. Dengan ini kami sampaikan Laporan Transparasi Tata Kelola PT. BPR Arta Kedaton Makmur untuk periode Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Arta Kedaton Makmur



HC. Ho Lie Tjoe
Direktur Utama



ARTA KEDATON MAKMUR

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Jl. Laks. Malahayati No. 139 Telp. (0721) 473855 (Hunting) Fax. (0721) 473882
Telukbetung - Bandar Lampung

No: 020/AKM/III/2025

Bandar Lampung, 5 Maret 2025

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
Jl. Way Sekampung No. 9 Pahoman
Bandar Lampung

Perihal: Laporan Transparasi Tata Kelola PT. BPR Arta Kedaton Makmur Tahun
Buku 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Transparasi Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ;

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/ESOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

Bersama ini kami lampirkan Laporan Transparasi Tata Kelola tersebut untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Arta Kedaton Makmur



HC. Ho Lie Tjoe
Direktur Utama

(tanpa subjek) - bankartakedat... (5.236 belum dibaca) - bankart... +

mail.yahoo.com/d/folders/2/messages/AJ_ALX4KNj5UZ-UWEQZsmANOiM0?reason=invalid_cred&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&g... ☆

Mandiri Cash Mana... BNIDirect KLIK BCA BISNIS - V... kirim lapbul LBBPR - Laporan Be... BRI Cash Managem... Live Streaming Chin... KLIKBCA BISNIS - V... >>

AWAL MAIL BERITA KEUANGAN OLAHRAGA SELES LIFESTYLE LAINNYA yahoo/mail PRO

yahoo/mail Terkirim x Cari di terkirim... Lanjutan v

Tulis

← Kembali ↶ ↷ → Arsipkan Pindahkan Hapus Spam ...

• Laporan Transparasi Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 Yahoo/Terkirim ☆

AK arta kedaton
Dari: bankartakedaton@yahoo.com
Kepada: mailingroomkolp@ojk.go.id

Kam, 27 Mar jam 16.10 ☆

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pengawas
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS. Dengan ini kami sampaikan Hasil Scan Laporan Transparasi Tata Kelola PT. BPR Arta Kedaton Makmur untuk periode Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Email Masuk 5,2 rb

Belum Dibaca

Berbintang

Draft 185

Terkirim

Arsip

Spam

Sampah

^ Lebih sedikit

Tamp... Sembunyikan

Foto

Dokumen

Langganan

Folder Sembunyikan

SEND IT WITH STYLE

Delight your friends and family with Stationery on Yahoo Mail.

Try it now

THE #1 FILM DESTINATION

\$93,069.87

LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR TAHUN 2024



ARTA KEDATON MAKMUR
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

**Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar
Lampung, Lampung**

TELEPON: (0721) 473 855

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
Alamat	JALAN LAKS MALAHAYATI NO 139, TELUK BETUNG - BANDAR LAMPUNG
Nomor Telepon	(0721) 473 855

Penjelasan Umum:

Pelaksanaan tata kelola yang baik sangatlah penting di industri perbankan mengingat persaingan dan kemajuan teknologi saat ini. Dengan tata kelola yang baik dan konsisten diharapkan bank dapat bersaing dan meningkatnya kepercayaan stakeholders. Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 dan SEOJK No. 12/ SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, PT BPR Arta Kedaton Makmur senantiasa terus meningkatkan tata kelola yang baik untuk melindungi kepentingan stakeholder, dengan menerapkan 5 prinsip yaitu :

1. Keterbukaan yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan dalam mewujudkan keterbukaan BPR mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Direksi dibantu oleh satuan kerja yang memiliki fungsi dan tugas khusus, begitu pula Dewan Komisaris dibantu oleh komite - komite yang melakukan pengawasan serta pemantauan atas pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi sebagai bentuk check and balances.
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional tidak dipengaruhi oleh siapapun, namun berdasarkan pertimbangan dengan berpedoman pada ketentuan dari Otoritas Perbankan, Undang- Undang dan Otoritas

lainnya.

5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian 2. Baik
Sendiri (Self Assessment) Tata
Kelola

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama HC. HO LIE TJOE

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan / jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau otoritas lainnya.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan
6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang

kepegawaian kepada pegawai.

7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - a) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan
 - b) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya,
 - c) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
10. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja / Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan-perundangan
11. Direksi wajib melaksanakan kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK apapun itu termasuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
12. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

2. Nama **J. TUTI**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan / jenjang organisasi.

4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau otoritas lainnya.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan
6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - a) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan
 - b) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya,
 - c) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
10. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja / Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan-perundangan
11. Direksi wajib melaksanakan kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK apapun itu termasuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
12. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

3. Nama JULIUS DHARMA ONGGORO

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan / jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau otoritas lainnya.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan
6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - a) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan
 - b) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya,
 - c) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
10. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja / Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan-perundangan
11. Direksi wajib melaksanakan kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK apapun itu

termasuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

12. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Direksi:

1. Penentuan Metode dan perhitungan CKPN yang sudah disetujui Dewan komisaris dalam proses pembuatan dan dituangkan ke dalam kedalam kebijakan CKPN sambil menunggu PA BPR Terbaru.
2. Debitur besar bermasalah yang berdampak dan berpengaruh signifikan terhadap NPL secara bertahap sudah telah dilakukan langkah - langkah penanganan khusus untuk dapat segera diselesaikan melalui penjualan agunan baik melalui lelang atau sukarela.
3. Berusaha untuk mencapai target kredit sampai di akhir tahun 2024 agar sesuai dengan budget yang ditetapkan dengan cara :
 - a) Memperluas pangsa pasar ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh BPR Arta Kedaton Makmur.
 - b) Mencoba memberikan kredit ke sektor- sektor baru yang memiliki potensi (contoh sektor jasa angkutan batu bara) yang memiliki prospek baik saat ini.
 - c) Mengelola debitur lancar yang masih memiliki kemungkinan untuk dilakukan penambahan atau di Top Up untuk debitur yang OS nya sudah mengecil baik dengan memperhatikan track record pembayaran di Bank BPR Arta Kedaton Makmur selama ini baik dan lancar,
 - d) Menggali potensi dari nasabah yang sudah lunas untuk ditawarkan kembali kredit,
 - e) Tetap menjadi kompetitor Bank Umum dengan tetap memperhatikan dan menjaga rasio 25 debitur besar di bawah 50% dengan meningkatkan pemberian kredit s.d Rp 2 M.
 - f) Menjaga kualitas kredit yang sehat dengan terus memperkuat bagian penagihan dengan mengerahkan semua marketing maupun bagian problem loan untuk mengingatkan dan mengunjungi debitur yang sudah jatuh tempo, melakukan eksekusi dan penjualan asset untuk menurunkan O/S debitur yang dinilai sudah tidak memiliki kemampuan membayar.
 - g) Mencoba mendapatkan database calon debitur melalui aplikasi di website BPR Arta Kedaton Makmur, dimana aplikasi di website hanya untuk mendapatkan database, setelah didapatkan database tersebut, maka akan dikunjungi oleh marketing yang bersangkutan dan diproses seperti proses kredit yang biasa.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama **HARDI CHANDRA**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
 - b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.

2. Nama **JASKINGTO**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
 - b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.

3. Nama **DISMAS IRAWAN ZIADI**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur

mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR

b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Penentuan metode CKPN yang dipakai untuk implementasi di awal tahun 2025
2. Penyelesaian debitur besar yang bermasalah yang berdampak berpengaruh signifikan terhadap NPL
3. Langkah yang dilakukan untuk mencapai apa yang tertuang di RBB sampai dengan akhir tahun 2024.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1. Komite

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab

01. Komite Audit

Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan

proses pelaporan keuangan.

2) Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.

b) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntan yang berlaku.

c) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris.

4) Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.

	<p>Jumlah Rapat</p>	<p>6) Menyusun dan/ atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.</p> <p>8</p>
	<p>Program Kerja Komite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review atas Laporan Audit Intern atas pemeriksaan baik kantor pusat maupun kantor cabang 2. Pemantauan debitur besar yang masuk kredit bermasalah 3. Penunjukan AP dan KAP atas Laporan Keuangan PT. BPR Arta Kedaton Makmur Tahun Buku 31 Desember 2024 <p>Realisasi Program Kerja Komite:</p> <p>SKAI telah melaksanakan pemeriksaan rutin hasilnya sudah sesuai.</p>	
<p>2.</p>	<p>Komite</p> <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab</p>	<p>02. Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik. 2) Dalam kaitan dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 3) Komite Pemantau Risiko wajib menyusun

	dan/ atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko
Jumlah Rapat	3
Program Kerja Komite:	
1. Pemantauan Kredit, Manajemen Risiko, Likuiditas dan SDM	
2. Pemantauan Tindak Lanjut hasil Audit baik Intern maupun Ekstern	
3. Pemantauan Eksternal	
Realisasi Program Kerja Komite:	
Semua resiko masih terjaga dengan cukup baik, walaupun ada rasio 25 debitur besar masih cukup tinggi akan tetapi masih tetap dimitigasi dengan pemberian jaminan yang kuat dan karakter debitur yang baik .	

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tindak lanjut rekomendasi berupa surat dari komisaris kepada Direksi

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

1.	Nama Anggota Komite	Dismas Irawan Ziadi
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	01. Ketua Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko

	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
2.	Nama Anggota Komite	Erni Salim
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
3.	Nama Anggota Komite	Kuswandi Wirya
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen

	Risiko	Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
4.	Nama Anggota Komite	I Made Sutharjana
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang Hukum
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
5.	Nama Anggota Komite	JASKINGTO
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang keuangan perbankan dan manajemen risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	01. Ketua Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen

Risiko	Risiko
Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	HC HO LIE TJOE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	J. TUTI
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	JASKINGTO
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	HC. HO LIE TJOE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	J. TUTI
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	JASKINGTO
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	HC. HO LIE TJOE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	J. TUTI
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	JASKINGTO
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada perusahaan lain

Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	HC. HO LIE TJOE
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada

	Anggota Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	J. TUTI
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada

	Anggota Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	JASKINGTO
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	HC. HO LIE TJOE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	J. TUTI
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	JASKINGTO
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp3.843.600.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp721.200.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp796.238.568
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp60.100.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
---------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan	Rp0

Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Perumahan 0 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Perumahan Direksi Rp0
(Rp)

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) 3 orang

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) 3 orang

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Rp0

Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Tunjangan lain - lain sesuai dengan SOP

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio a) gaji pegawai yang tertinggi dan b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 839,00

2. Rasio a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 532,00

3. Rasio a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 205,10

4. Rasio a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 620,00

5. Rasio a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 970,00

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	29 Februari 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Metode Pembentukan CKPN PT. BPR Arta Kedaton Makmur
2.	Tanggal Rapat	20 Maret 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Pembahasan mengenai Debitur besar yang bermasalah
3.	Tanggal Rapat	30 Juli 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	<ul style="list-style-type: none"> Menjawab tindak lanjut surat OJK mengenai konsolidasi terhadap kepemilikan PSP yang sama di BPR ARTa Kedaton Makmur dan BPR Inti Dana Sentosa

- Menjawab tindak lanjut surat OJK mengenai konsolidasi terhadap kepemilikan PSP yang sama di BPR ARTa Kedaton Makmur dan BPR Inti Dana Sentosa
- Penentuan Nama BPR Arta Kedaton Makmur terkait perubahan Nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat
- Pembahasan pencapaian Realisasi RBB semester I tahun 2024 baik secara konsolidasi maupun per Cabang

4. Tanggal Rapat 11 November 2024

Jumlah Peserta 6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan Pencapaian kredit di posisi Oktober 2024
2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan Direksi untuk mencapai target di tahun 2024 dan untuk tahun 2025..
3. Pembahasan debitur bermasalah dan target penyelesaian untuk 3 debitur bermasalah yang menyumbang NPL terbesar lebih rinci.

5. Tanggal Rapat 30 Mei 2024

Jumlah Peserta 3 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan pelepasan kredit untuk 3 debitur besar yang menunjukkan indikasi ke arah macet, dan dibandingkan dengan pelepasan kredit, akan menjadi bermasalah dan meningkatkan NPL. Bagaimana tindak lanjut terkait perkembangan debitur tersebut.

Hasil pelaksanaan Rapat di tuangkan ke dalam Risalah Rapat

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1

1. Nama Anggota Dewan Komisaris HARDI CHANDRA

	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	JASKINGTO
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
3.	Nama Anggota Dewan Komisaris	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada BPR tertuang didalam absen rapat

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun
Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada
Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada
Tahun Sebelumnya 0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Laporan 0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun 0 kasus

Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0 kasus

Pada Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

Tidak Ada / Nihil

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang
Telah Selesai (telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap) 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang
Telah Selesai (telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap) 0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang
Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang
Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Tanggal Pelaksanaan 13 Agustus 2024

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Sungai Budi Group
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi HUT RI 17 Agustus 2024
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Kec Kupang Teba
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi HUT RI 17 Agustus 2024 di Kec Kupang Teba
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Partisipasi Acara SPIRIT FKIJK
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi Acara SPIRIT FKIJK
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	22 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Sumbangan Paduan Suara Tingkat Nasional Wanita Katolik
	Penjelasan Kegiatan	Grup Paduan Suara
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	29 November 2024

Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Sponsor Kalender PSMTI Lampung
Penjelasan Kegiatan	PSMTI Lampung
Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
6. Tanggal Pelaksanaan	17 Desember 2024
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Partisipasi perayaan Natal BMPD - FKIJK Tahun 2024
Penjelasan Kegiatan	BMPD Lampung
Jumlah (Rp)	Rp2.000.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR ARTA KEDATON MAKAMUR untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

y²⁵

Bandar Lampung, 05 Maret 2025

PT. BPR ARTA KEDATON MAKAMUR

Menyetujui


HARDI CHANDRA
KOMISARIS UTAMA


HC. HO LIE TJOE
DIREKTUR UTAMA

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Nama BPR : PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung
Nomor Telepon : (0721) 473 855
Posisi Laporan : Tahun 2024
Modal Inti : Rp203.618.538.429
Total Aset : Rp540.381.737.135

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 2 (Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

1. 8/5/24

Kesimpulan
<p>Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.</p>
Faktor Positif
<p>A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan. 2. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 3. Struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 4. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 5. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan. 7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 8. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. 9. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 10. Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 11. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
<p>B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR dinilai memadai. 2. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR adalah memadai. 3. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris di BPR menunjukkan kondisi memadai. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dengan pencapaian memadai. 5. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai. 6. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi memadai. 7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian memadai. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian memadai. 9. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.

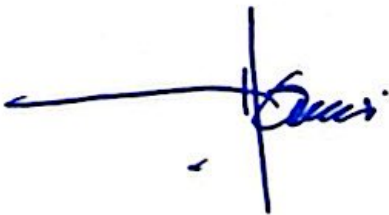
<p>10. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai memadai.</p> <p>11. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR saat ini dinilai memadai.</p> <p>12. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.</p>
C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola
<p>1. Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dinilai memadai.</p> <p>2. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai memadai.</p> <p>3. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah memadai.</p> <p>4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dengan pencapaian memadai.</p> <p>5. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR adalah memadai.</p> <p>6. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR dinilai memadai.</p> <p>7. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.</p> <p>8. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai.</p> <p>9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.</p> <p>10. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR berada dalam kondisi memadai.</p> <p>11. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai memadai.</p> <p>12. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi memadai.</p>
Faktor Negatif
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur
<p>1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.</p> <p>2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, yaitu Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dengan penilaian masih terpenuhi sebagian sebagian.</p>
B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola
Nihil

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola
Nihil

Bandar Lampung, 15 Januari 2025

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR

Diketahui



HC. HO LIE TIOE
Direktur Utama



I. TUTI
Direktur Bisnis



JULIUS DHARMA ONGGORO
Direktur Kepatuhan

Disetujui



HARDI CHANDRA
Komisaris Utama



IASKINGTO
Komisaris Independen



DISMAS IRAWAN ZIADI
Komisaris Independen